

Surat Terbuka Untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang Terhormat,

Perkenalkan, kami adalah mahasiswa program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, program studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Manajemen Komunikasi. Ijinkanlah pada kesempatan ini, kami memberikan sumbang saran bagi Bapak terkait isu berbagai permasalahan yang ada di Papua. Kami merasa tergelitik dengan PT. Freeport yang saat ini tengah menjadi perhatian nasional dan diberitakan secara massif di berbagai media massa. Kami yakin, masalah di Papua jauh lebih besar dari pada sekedar masalah PT. Freeport.

Surat ini merupakan bagian dari tugas pada mata kuliah Teori Organisasi dan Manajemen yang sedang kami ikuti di bawah bimbingan Drs. Sudarmo, MA., Ph.D. Meski begitu, kami menyadari bahwa sebagai anak bangsa, kami berkewajiban memberikan kontribusi sekecil apapun bagi pembangunan bangsa Indonesia. Surat terbuka kami ini merupakan bentuk cinta kami kepada Bapak sebagai pemimpin negeri ini. Semoga Bapak berkenan membaca surat ini sampai titik akhirnya nanti.

Bapak Jokowi dan JK yang Terhormat,

Papua merupakan bagian dari Indonesia. Sejak beberapa puluh tahun lalu, Papua mengalami masa-masa konflik. Selain konflik akibat gerakan separatis, konflik antarsuku, konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan, dan berbagai konflik lainnya. Belum lagi penolakan generasi muda Papua atas integrasi wilayah tersebut ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penolakan tersebut juga menjadi bibit potensi konflik yang akan tumbuh dan berkembang apabila tidak dilakukan penyelesaian sejak saat ini.

Kami menilai seharusnya konflik-konflik yang ada di Papua sudah bisa diselesaikan sejak dulu. Silih bergantinya tampuk pemerintahan ternyata belum cukup untuk menegakkan komitmen dialog guna penyelesaian masalah Papua. Apabila dialog tersebut dilakukan sejak dulu, pemerintahan Bapak Jokowi dan JK tentu tidak perlu ketiban pulung atas masalah yang sama.

Akar masalah di Papua kami nilai adalah masalah kesejahteraan sosial. Papua dengan potensi sumber daya alamnya yang sedemikian banyak, ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebut saja potensi tambang yang digarap oleh PT. Freeport. Dan data terkini yang bersumber dari PT. Freeport Indonesia mengenai cadangan bijih yang ada di tambang tersebut adalah 2,27 miliar ton bijih yang terdiri dari 1,02 persen

tembaga atau sekitar 13 juta ton, 0,83 persen gram per ton emas atau sekitar 800 ribu ton dan 4,32 gram/ton perak.

Meski di tanah leluhurnya terdapat tambang emas terbesar di dunia, orang Papua, khususnya mereka yang tinggal di Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya atau daerah sekitar pegunungan tengah pada setiap tahunnya hanya mendapat ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke 212 dari 300an lebih kabupaten di Indonesia. Hampir 70 persen penduduknya tidak mendapatkan akses terhadap air yang aman, dan 35.2 persen penduduknya tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, lebih dari 25 persen balita juga tetap memiliki potensi kurang gizi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah orang miskin di tiga kabupaten tersebut, mencapai lebih dari 50 persen dari total penduduk. Artinya, pemerataan kesejahteraan tidak terjadi. Meskipun pengangguran terbuka rendah, tetapi secara keseluruhan pendapatan masyarakat setempat mengalami kesenjangan. Bisa jadi kesenjangan yang muncul antara para pendatang dan penduduk asli yang tidak mampu bersaing di tanahnya sendiri. Bisa jadi pula, angka prosentase yang menunjukkan kemiskinan, seperti akses terhadap air bersih, kurang gizi, akses terhadap sarana kesehatan mengandung bias rasisme. Artinya, kemiskinan dihadapi oleh penduduk asli dan bukan pendatang.

Wahai Pemimpin Kami yang Terhormat,

Masalah yang kami ungkapkan tadi, kami yakini sebagai sebuah hal kecil dari sedemikian besar dan kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan Papua dan PT. Freeport. Apabila masalah itu tidak diselesaikan dari sekarang, maka akan berpotensi sebagai faktor pemicu konflik di kemudian hari. Dan bom waktu itu bisa meledak sewaktu-waktu apabila mendapat pembiaran.

Melalui surat terbuka ini, kami menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah-langkah secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur. Semangat perubahan yang Bapak bawa melalui Nawacita bisa menjadi nafas yang sama dalam melakukan *collaborative governance* saat melakukan upaya penyelesaian segala konflik dan potensi konflik di Papua yang memiliki keterkaitan dengan PT. Freeport.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Drs. Sudarmo, MA., Ph.D terkait konflik antara kelompok masyarakat dengan kebijakan yang diambil pemerintah, diketahui bahwa perlu inisiatif seluruh pihak terkait dalam penyelesaian konflik tersebut. Oleh karenanya, penyelesaian masalah dan potensi masalah di Papua memerlukan inisiatif PT. Freeport, penduduk lokal, dan pemerintah dari berbagai tingkatan. Semua pihak terkait

tersebut wajib memiliki peran yang sama untuk merumuskan tujuan, agenda, dan langkah dalam berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hasil penelitian tersebut kami yakini bisa diterapkan dalam penyelesaian masyarakat di Papua. Dengan catatan, dialog yang dilakukan harus dalam satu irama, yakni mencari solusi terbaik bagi masalah yang ditimbulkan akibat aktifitas tambang PT. Freeport. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menginisiasi dialog tersebut. Diperlukan adanya kepemimpinan yang fasilitatif, aturan main yang jelas dan tegas, serta memastikan bahwa masyarakat lokal harus terwakili secara substantif dalam dialog tersebut, dimana proses dialog difasilitasi oleh fasilitator independen.

Bapak Jokowi – JK yang Kami Hormati

Komitmen kedua belah pihak dalam melakukan dialog harus dipertegas. Komitmen pihak pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak sudah jelas bahwa untuk menyelesaikan konflik Papua harus secara demokratis dan damai. Sedangkan, komitmen rakyat Papua yaitu solusi damai akan ditemukan melalui dialog. Setelah komitmen kedua belah pihak ditentukan, selanjutnya perlu dibuat kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kedua pihak tidak akan membahas tentang kemerdekaan Papua. Kesepakatan tersebut menjadi sangat krusial untuk menahan pemerintah agar mau melanjutkan dialog dalam menyelesaikan konflik. Sementara itu, pihak pemerintah juga harus menghilangkan kecurigaannya bahwa dalam dialog rakyat Papua tidak akan membahas tentang masalah kemerdekaan.

Selain menghilangkan kecurigaan, pemerintah harus menyakinkan rakyat Papua bahwa ada komitmen untuk menyelesaikan konflik melalui dialog damai. Selama rakyat Papua belum yakin akan komitmen pemerintah, nampaknya dialog damai masih sulit untuk dilakukan. Setelah adanya komitmen dan kepercayaan dari kedua pihak, diperlukan pembuatan kerangka acuan dan prinsip-prinsip dasar dialog. Kerangka dan prinsip tersebut harus disepakati oleh kedua pihak.

Dengan demikian, dialog tersebut akan memberikan ketenteraman dan keadilan bagi keduanya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, adanya kerangka acuan juga sebagai penunjuk arah dalam dialog yang akan dilaksanakan. Jika komitmen sudah ditentukan dan kepercayaan telah didapatkan, dialog damai kedua belah pihak dapat dilaksanakan.

Saat dialog berlangsung, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat Papua untuk melakukan dialog. Partisipasi perlu dilakukan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik bagi semua orang yang hidup di Papua. Semua anggota masyarakat Papua seharusnya merasa terlibat dalam keseluruhan proses dialog. Jika sudah dipastikan bahwa masyarakat

Papua ikut berpartisipasi, maka pembuatan tahapan-tahapan dalam dialog sudah dapat dilakukan.

Tahapan dalam dialog diawali dengan dialog internal orang Papua sendiri. Setelah tahapan tersebut dilaksanakan, proses selanjutnya adalah dialog antarwarga Papua, meliputi setiap orang yang tinggal di Papua, baik dari warga asli maupun non-Papua, dan warga Papua yang hidup di luar negeri. Terakhir, adalah dialog warga Papua dengan Pemerintah Indonesia. Pada tahap ini, pemerintah dan rakyat Papua melibatkan diri dalam dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang disetujui oleh keduanya. Pihak yang memfasilitasi jalannya dialog damai adalah lembaga-lembaga yang berbeda-beda pada tahap yang berbeda-beda pula.

Setelah seluruh proses dialog sudah terlaksana, hal terakhir yang harus dilakukan adalah pengawasan. Komitmen kedua pihak untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai masih harus diuji setelah tercapai kesepakatan dalam dialog terakhir. Jika komitmen yang sudah disepakati dalam dialog damai tersebut masih tidak ditindaklanjuti, maka usaha yang ditempuh sebelumnya menjadi sia-sia. Hal itu mengakibatkan kredibilitas kedua belah pihak jatuh.

Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang Berbahagia.

Dan, Bapak, karena masalah perpanjangan kontrak PT. Freeport di Papua masih menjadi masalah yang memanas, kami ingin memberikan sumbang saran atas semua masalah tentang Papua dan PT. Freeport, sebagai berikut:

1. Masukan utama kami dalam penyelesaian berbagai masalah di Papua adalah melalui dialog damai. Cara penyelesaian konflik seharusnya tidak berorientasi pada satu kepentingan saja, tetapi harus dilakukan dalam seluruh perspektif tentang Papua. Negara harus hadir di Papua, untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, sebagaimana salah satu Nawacita Bapak. Negara juga tidak boleh lemah dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya di Tanah Papua.
2. Dialog itu pula yang harus dilakukan saat akan memperpanjang kontrak PT. Freeport. Dialog antara kedua belah pihak seharusnya bisa memberikan hasil positif bagi bangsa Indonesia, diantaranya:
 - a. Memastikan PT. Freeport Indonesia di Papua untuk memenuhi seluruh regulasi yang berlaku, tanpa pengecualian, tanpa tawar menawar, dan tanpa alasan apapun. Kami berharap ada sikap tegas dari pemerintah untuk *law enforcement* ini.
 - b. Memastikan bahwa PT. Freeport akan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam bentuk apapun yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Entah itu dalam

bentuk penambahan royalty, penambahan porsi kepemilikan saham, penambahan anggaran bagi pembangunan Papua dan masyarakatnya serta kontribusi lain untuk mengimbangi pengerukan kekayaan alam Indonesia oleh mereka.

- c. Memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat lokal, pendidikan, keamanan, infrastruktur, dan budaya setempat menjadi perhatian utama yang harus dikelola dan dibangun, dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan antara investor dengan masyarakat.
 - d. Kemudian, Bapak juga harus mempersiapkan *blueprint* pengambilalihan tambang PT. Freeport di kemudian hari, entah kapan. Kita tentu tidak ingin PT. Freeport berada di bumi Papua selamanya, suatu saat nanti, tambang tersebut harus dikuasai oleh pemerintah. Kajian yang mendalam dan terpadu harus disusun agar siapapun nanti yang memimpin bangsa ini bisa melakukan langkah persiapan dengan tujuan akhirnya adalah mengambil alih tambang PT. Freeport. *Blueprint* itu sangat penting sebagai langkah antitipasi apabila nanti ada resistensi dari perusahaan maupun dari pihak lain yang menolak pengambilalihan kepemilikan pada saat kontrak tambang nanti habis.
3. Kalaupun kontrak PT. Freeport akan dihentikan pada 2021 mendatang – meski kami tidak begitu yakin dengan kemungkinan diambilnya keputusan ini – Bapak berdua harus menyiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi berbagai hal pula, misalnya:
- a. Kemungkinan digunakannya isu pelanggaran hak asasi manusia dan keinginan untuk merdeka dari masyarakat Papua oleh Amerika dan sekutunya mengingat PT. Freeport merupakan perusahaan milik negara super power tersebut.
 - b. Bisa jadi akan ada banyak kesulitan yang akan dialami Indonesia mengingat ketergantungan kita terhadap komoditas ekspor yang sedemikian tinggi, dan hal itu menjadi salah satu titik tawar negara yang berkepentingan dengan PT. Freeport. Diantaranya dalam hal alat sistem utama persenjataan (alutsista) TNI/Polri yang sebagian besar diantaranya disuplai dari Amerika Serikat, serta berbagai ketergantungan lainnya. Namun, kami yakin, kita masih punya waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri seandainya opsi penghentian kontrak ini diambil.
 - c. Apabila nanti tambang PT. Freeport itu benar-benar dikelola negara, maka hal tersebut harus memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Jangan sampai, PT. Freeport kemudian menjadi “bancakan” oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan akhirnya rakyat hanya selalu menjadi yang terpinggirkan dan terkalahkan di negerinya sendiri.

Semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden diberikan kesehatan dan kemampuan saat memimpin bangsa ini, di bawah lindungan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah berkenan membaca surat ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Kami,

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. ()
6. ()
7. ()
8. ()
9. ()
10. ()
11. ()
12. ()
13. ()
14. ()
15. ()
16. ()
17. ()
18. ()
19. ()
20. ()
21. ()
22. ()
23. ()
24. ()
25. ()
26. ()

- 27. ()
- 28. ()
- 29. ()
- 30. ()
- 31. ()
- 32. ()
- 33. ()
- 34. ()
- 35. ()
- 36. ()
- 37. ()
- 38. ()
- 39. ()
- 40. ()
- 41. ()
- 42. ()
- 43. ()
- 44. ()